

MANUAL

Konstruksi dan Bangunan



MANUAL MANAJEMEN PROYEK

(Project Management Manual / PMM)

Western Indonesia National Roads Improvement Project
(WINRIP)

Revisi 2

Maret 2017



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM &
PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



PRAKATA

Project Management Manual (PMM) - *Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP)* adalah manual manajemen proyek yang dijadikan acuan oleh para penyelenggara *WINRIP* agar dapat melaksanakan proyek tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, berwawasan lingkungan, dan tertib administrasi.

PMM disusun berdasarkan dokumen *Loan Agreement IBRD 8043-ID*, syarat-syarat kontrak konstruksi maupun konsultasi, perlindungan lingkungan hidup dan sosial, rencana tindak anti korupsi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan proyek jalan.

PMM diterbitkan pertama kali pada Maret 2012 sebagai salah satu persyaratan mulai efektifnya perjanjian pinjaman *WINRIP Loan No. IBRD 8043-ID*. Secara periodik *PMM* perlu dimutakhirkan guna disesuaikan dengan perubahan *Loan Agreement*, perubahan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan jalan, dan peraturan lainnya yang terkait.

Dengan mulai berjalannya kontrak-kontrak konsultasi pada Tahun 2012 dan kontrak-kontrak konstruksi pada Tahun 2014, maka pada bulan Mei 2015 telah dilakukan pemutakhiran (Revisi-1 *PMM*) untuk menyesuaikan dengan kebutuhan administrasi dan pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah berjalan.

Pada kesempatan kali ini pemutakhiran *PMM* yang kedua (Revisi-2 *PMM*) dilakukan untuk menyesuaikan dengan :

1. *Amendment No.2 Loan Agreement IBRD 8043-ID*;
2. Perubahan peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan jalan;
3. Perubahan peraturan terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dan sosial;
4. Dokumen/syarat-syarat kontrak fisik (*civil works*) yang dilelangkan dengan metode pengadaan *National Competitive Bidding (NCB)*;
5. Perubahan struktur organisasi PMU dan PIU *WINRIP*;
6. Perbaikan redaksional.

Dengan diterbitkannya Revisi-2 *PMM-WINRIP* ini para penyelenggara *WINRIP* didorong untuk melaksanakan manajemen proyek dengan baik agar pelaksanaan *WINRIP* dapat diselesaikan dengan tertib administrasi.

Jakarta, 20 April 2017

Direktur Jenderal Bina Marga

ARIE SETIADI MOERWANTO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
GLOSSARY	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 LATAR BELAKANG	1-1
1.2 WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT (WINRIP)	1-1
1.3 TUJUAN WINRIP	1-2
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN PMM	1-2
1.5 RUANG LINGKUP	1-3
BAB 2 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PROYEK	2-1
2.1 INSTANSI TERKAIT	2-1
2.2 PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) WINRIP	2-5
2.3 PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU) WINRIP	2-6
2.4 LINGKUP TUGAS JASA KONSULTANSI UNTUK KEGIATAN MENDUKUNG PELAKSANAAN PROYEK WINRIP	2-9
BAB 3 PERENCANAAN UMUM DAN PEMROGRAMAN	3-1
3.1 PENGANTAR	3-1
3.2 DASAR HUKUM DAN RUJUKAN	3-2
3.3 PROSEDUR PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN	3-2
3.4 TATA CARA USULAN PROGRAM / PERUBAHAN RUAS	3-7
3.5 TATA CARA USULAN PROGRAM DARI PROYEK – PROYEK LOAN IBRD 8043-ID WINRIP	3-9
3.6 PERUBAHAN PAGU	3-10
3.7 PERUBAHAN PENANGANAN / PERUBAHAN TARGET PANJANG	3-10
BAB 4 PROSEDUR PERENCANAAN TEKNIS	4-1
4.1 UMUM	4-1
4.2 JENIS PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN	4-1
4.3 PENYIAPAN DESAIN DAN REVISI DESAIN	4-1
4.4 LEGALISASI GAMBAR PERENCANAAN TEKNIS	4-2
4.5 KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN UNTUK JALAN – JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER	4-2
4.6 KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN	4-4

4.7	PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN	4-7
BAB 5 PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI		5-1
5.1	RUJUKAN DAN PENGERTIAN DASAR	5-1
5.2	METODA PENGADAAN	5-4
5.3	REVIEW DAN PERSETUJUAN BANK DUNIA	5-4
5.4	PERPANJANGAN MASA PEMELIHARAAN	5-5
5.5	KUALIFIKASI PENYEDIA JASA PEMBORONGAN	5-5
5.6	PROSEDUR LELANG	5-11
5.7	EVALUASI PENAWARAN	5-19
BAB 6 PENGADAAN JASA KONSULTANSI		6-1
6.1	RUJUKAN	6-1
6.2	PROSEDUR NOL SELEKSI KONSULTAN DARI BANK DUNIA	6-1
6.3	QUALITY AND COST BASED SELECTION (QCBS)	6-2
6.4	TERMS OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	6-2
6.5	PENGUMUMAN UNTUK PESERTA YANG BERMINAT (REQUEST EXPRESSIONS OF INTEREST/REOI)	6-2
6.6	PENYUSUNAN SHORT LIST KONSULTAN	6-3
6.7	PENYIAPAN REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)	6-3
6.8	PENGIRIMAN UNDANGAN SAMPAI DENGAN KLARIFIKASI	6-4
6.9	PENYAMPAIAN PROPOSAL	6-4
6.10	EVALUASI PROPOSAL TEKNIK (TER – TECHNICAL EVALUATION REPORT)	6-5
6.11	EVALUASI FINANSIAL/HARGA	6-5
6.12	KOMBINASI EVALUASI TEKNIS DAN BIAYA	6-5
6.13	NEGOSIASI DAN PENYIAPAN DRAFT KONTRAK	6-5
6.14	PENETAPAN PEMENANG	6-6
6.15	PENGUMUMAN PEMENANG LELANG	6-6
BAB 7 IMPLEMENTASI KONTRAK		7-1
7.1	UMUM	7-1
7.2	PERATURAN-PERATURAN	7-1
7.3	PENDELEGASIAN KEWENANGAN	7-2
7.4	URUTAN PEKERJAAN DARI AWAL SAMPAI DENGAN AKHIR PEKERJAAN	7-6
7.5	PANDUAN PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PROYEK	7-10
7.6	PEMETAAN GPS (ICB & NCB)	7-45
7.7	REVISI DESAIN	7-45
7.8	VARIASI DAN AMENDEMEMEN KONTRAK	7-45
7.9	PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI)	7-49

7.10	PENYELESAIAN PEKERJAAN	7-53
BAB 8	MANAJEMEN KEUANGAN DAN PELAPORAN PROYEK	8-1
8.1	PERATURAN-PERATURAN DI BIDANG KEUANGAN.....	8-1
8.2	TATA CARA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN.....	8-1
8.3	TATA CARA PENARIKAN DANA	8-5
8.4	PELAPORAN	8-12
8.5	SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN PROYEK.....	8-13
BAB 9	PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA	9-1
9.1	UMUM.....	9-1
9.2	ACUAN.....	9-1
9.3	PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI	9-2
9.4	TECHNICAL AUDIT.....	9-8
9.5	RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) / Anti-Corruption Action Plan (ACAP).....	9-8
BAB 10	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN, PENGADAAN TANAH DAN KESELAMATAN JALAN (PPLPTKJ)	10-1
10.1	UMUM.....	10-1
10.2	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	10-2
10.3	KERANGKA KEBIJAKAN BANK DUNIA DAN PERATURAN PEMERINTAH INDONESIA.....	10-4
10.4	GAMBARAN UMUM PROYEK.....	10-13
10.5	PROSEDUR PENYARINGAN LINGKUNGAN	10-16
10.6	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN (Amdal & UKL-UPL serta SPPL).....	10-18
10.7	INTEGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN KE DALAM DESAIN.....	10-19
10.8	RENCANA KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RKPPPL).....	10-20
10.9	PROSEDUR PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI	10-23
10.10	PEMANTAUAN (MONITORING) LINGKUNGAN DAN PENGADAAN TANAH.....	10-33
10.11	PEMANTAUAN SOSIALISASI HIV-AIDS	10-38
10.12	KESELAMATAN JALAN.....	10-38
BAB 11	RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI DAN UPAYA-UPAYA PENYELENGGARAAN PROYEK DENGAN MENINGKATKAN TRANSPARANSI	11-1
11.1	RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) / ANTI-CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP)	11-1
11.2	KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK/ PUBLIC DISCLOSURE	11-3
11.3	WAKIL PENGAMAT DARI MASYARAKAT (WPM) / COMMUNITY REPRESENTATIVE OBSERVERS (CROs).....	11-19
11.4	FASILITASI PEMANTAU PIHAK KETIGA.....	11-24
11.5	KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN.....	11-27
11.7	PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI.....	11-41